



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LPT 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2022**

Gedung B Lt. 1 Komplek Perkantoran Setda Kab. Karanganyar
Jl. Lawu No.385 B Karanganyar No.Telp (0271) 495039,Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : kominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. Laporan ini secara garis besar berisi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan LPT ini kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan untuk menyempurnakan penyusunan LPT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan kita dan memberikan rahmat-Nya. Amin.

Akhir kata, semoga LPT ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Assisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Karanganyar



Drs. SUJARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 199003 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| BAB II Deskripsi OPD | 3 |
| A. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar | 3 |
| B. Standard Operating Procedure (SOP) | 3 |
| C. Perda/Perbub Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan | 3 |
| D. Struktur Organisasi | 4 |
| E. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan.... | 6 |
| BAB III Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 8 |
| A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 8 |
| B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 8 |
| C. Urusan Pilihan..... | 14 |
| D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 14 |
| BAB IV Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah..... | 15 |
| A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 15 |
| B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 15 |
| C. Urusan Pilihan..... | 26 |
| D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 26 |
| BAB V Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan | 27 |

| | | |
|----------|--|----|
| BAB VI | Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal | 28 |
| BAB VII | Inovasi Dan Penghargaan | 29 |
| | A. Inovasi | 29 |
| | B. Penghargaan | 29 |
| BAB VIII | Penutup | 31 |
| | A. Kesimpulan | 31 |
| | B. Saran | 32 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Daerah.

B. Dasar Hukum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam hal ini berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas pada tahun 2021.

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang-Undang No 23 Tahun 2014
4. Landasan Operasional :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .Kabupaten Karanganyar.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- e. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- f. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD/OPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2022. LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 5 Program, yang dijabarkan dalam 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

BAB II

DESKRIPSI SKPD/OPD

A. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, adalah

"Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Daerah".

B. STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

SOP kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

- Terlampir -

C. PERDA/ PERBUP TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

1. Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Bupati

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah.
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif,
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif.
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

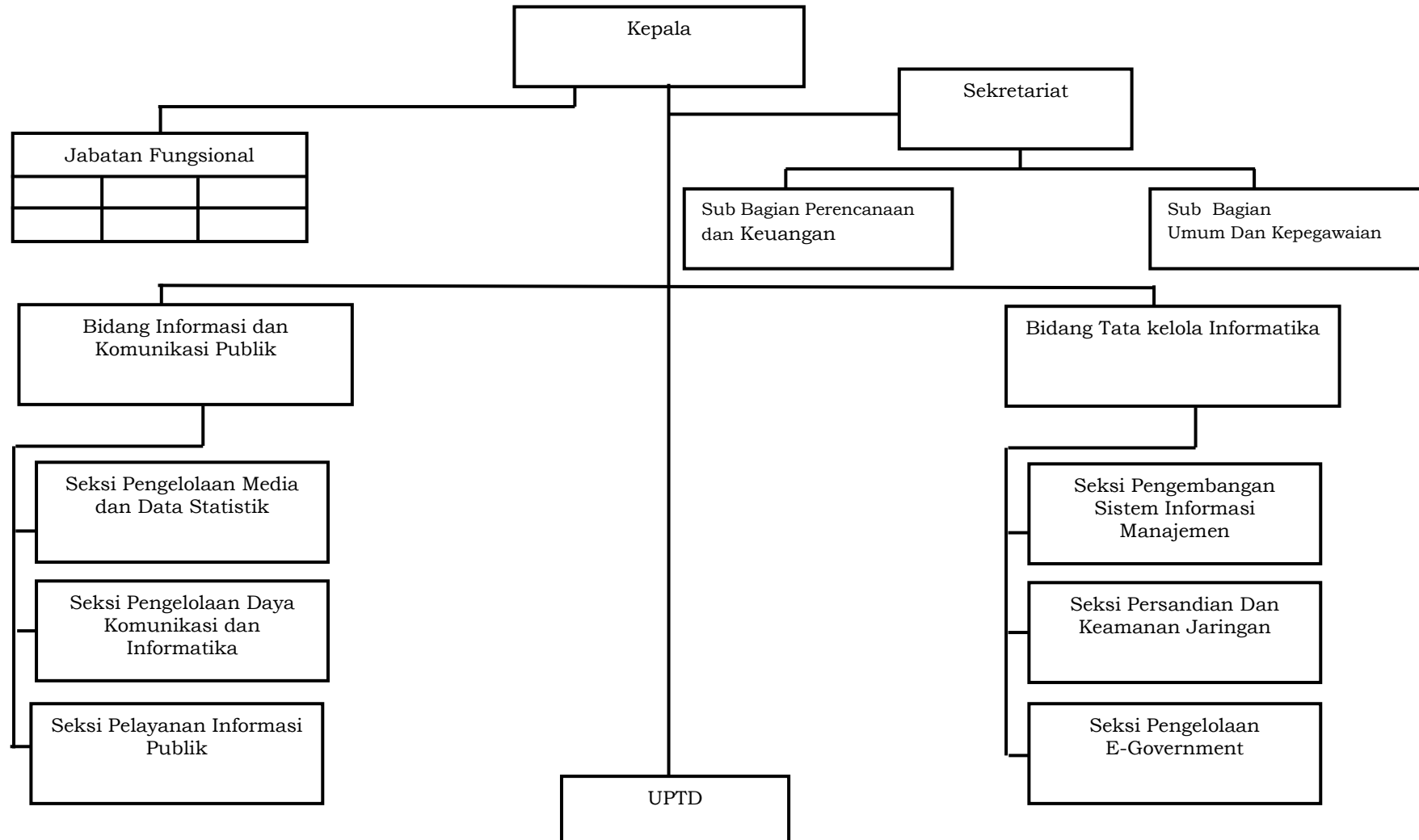
- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

D. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN.

1. Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | STATUS KEPEG. (PNS/CPNS) | PANGKAT/GOL |
|--|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| ➤ SEKRETARIAT | | | | | |
| 1 | Isnan Nur Aziz, S.Kom. | 19780210 200501 1 016 | Sekretaris | PNS | Pembina (IV/a) |
| 2 | Tardi Wartono, S.Sos. | 19660402 198912 1 001 | Kepala Sub Bagian Umum | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 3 | Wahyono, S.H. | 19690417 199303 1 007 | Perencana Ahli Muda | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 4 | Endang Werdiningsih, S.Sos. | 19711210 199403 2 002 | Bendahara | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 5 | Murniati, S.E. | 19650126 198603 2 009 | Verifikator Keuangan | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 6 | Nur Pratiwi Widyaningsih, S.E. | 19851124 201001 2 022 | Penata Laporan Keuangan | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 7 | Wakidi, S.Sos. | 19680415 199203 1 011 | Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 8 | Mami Suparyatmi, S.E. | 19660503 200701 2 010 | Penata Laporan Keuangan | PNS | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| 9 | Rm Helmy Ary Respati | 19790830 201001 1 003 | Pengelola Kepegawaian | PNS | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| 10 | Sukarsi | 19661229 200701 2 007 | Petugas Keamanan | PNS | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| 11 | Sri Ijaswati | 19670905 200701 2 021 | Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana | PNS | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| 12 | Suparjo | 19770217 200902 1 003 | Pramu Bakti | PNS | Juru Tingkat I (I/d) |
| ➤ BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | |
| 13 | Heriyadi Wasito, S.E., M.M. | 19790320 200501 1 007 | Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik | PNS | Pembina (IV/a) |
| 14 | Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom. | 19780312 200604 2 008 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | PNS | Pembina (IV/a) |
| 15 | Mulyono, S.S.T. | 19721209 200701 1 012 | Analisis Konten Media Sosial | PNS | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| 16 | Sri Yanto | 19820927 200902 1 008 | Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik | PNS | Pengatur Tingkat I (II/d) |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | STATUS KEPEG. (PNS/CPNS) | PANGKAT/GOL |
|---------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 17 | Yuni Kartikawati | 19710529 200701 2 008 | Operator Radio | PNS | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| 18 | Wuri Ratnaningsih, S.E., M.M. | 19641230 198703 2 007 | Kepala Seksi Pengelolaan Media Dan Data Statistik | PNS | Pembina (IV/a) |
| 19 | Eko Sawitri, S.E. | 19670129 199103 2 004 | Pengelola Data Statistik | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 20 | Raden Puji Suryani, S.Sos. | 19670502 199303 2 008 | Analisis Berita | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 21 | Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S., M.M. | 19690421 199803 2 009 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | PNS | Pembina (IV/a) |
| 22 | Nur Afifah, S.Ag. | 19671120 199803 2 005 | Pengolah Data | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 23 | Indah Sulistiawati Effendhi, S.Sos. | 19830211 201001 2 023 | Calon Pranata Humas | PNS | Penata (III/c) |
| 24 | Tri Andani Kurnia Dewi, A.Md. | 19820308 201001 2 021 | Calon Pranata Humas | PNS | Penata Muda (III/a) |
| 25 | Nur Riyana Fitrianti, A.Md. | 19820722 201001 2 026 | Calon Pranata Humas | PNS | Penata Muda (III/a) |
| ➤ BIDANG TATAKELOLA INFORMATIKA | | | | | |
| 26 | Hartono, S.Sos., M.M. | 19691015 199003 1 007 | Kepala Bidang Tatakelola Informatika | PNS | Pembina (IV/a) |
| 27 | Agus Romadhoni, S.Kom. | 19790816 200902 1 003 | Pranata Komputer Ahli Muda | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 28 | Adi Yudha Prahara, S.Kom. | 19840622 201001 1 021 | Calon Pranata Komputer | PNS | Penata (III/c) |
| 29 | Hanif Puspitasari, S.Kom. | 19820831 201001 2 028 | Calon Pranata Komputer | PNS | Penata (III/c) |
| 30 | Surya Adi Kusuma, S.Kom. | 19830515 201001 1 029 | Pranata Komputer Muda | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 31 | Dodik Ariyadi, A.Md. | 19850112 201001 1 016 | Calon Pranata Komputer | PNS | Penata Muda (III/a) |
| 32 | Sri Setyowati, S.E. | 19800211 201001 2 014 | Calon Pranata Komputer | PNS | Penata Muda (III/a) |
| 33 | Hanif Setyo Wibowo, S.Kom. | 19840914 200902 1 003 | Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Jaringan | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 34 | Achilleus Rino Bitakmo, S.Kom. | 19810512 200604 1 015 | Pemeriksa Teknologi Informasi | PNS | Penata Tingkat I (III/d) |
| 35 | Suparno | 19731103 199803 1 012 | Analisis Sistem Informasi Dan Diseminasi Hukum | PNS | Penata Muda (III/a) |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | STATUS KEPEG. (PNS/CPNS) | PANGKAT/GOL |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|
| 36 | Wahyu Sanyoto, A.Md. | 19850312 201903 1 004 | Penyusun Progran Anggaran Dan Pelaporan | PNS | Pengatur (II/c) |
| 37 | Danang Rahadiansyah Arunadi, A.Md. | 19870820 201903 1 005 | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | PNS | Pengatur (II/c) |

BAB III

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Komunikasi dan Informatika

| No | IKK Output dan Capaian Kinerja | IKK Outcome | Rumus | Capaian Kinerja | |
|----|---|--|--|--|--|
| 1 | 1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100,00 % Ket.: 42/42 x 100% = 100% | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD | 100,00 % Ket. : 42/42 x 100 42/42 x 100% = 100% |
| | 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo | 100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100% | | | |
| | 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 9,00 aplikasi Ket.: monev RKPD, Emonev, Sidesa, | | | |

| | | | | | | |
|---|----|--|---|---|--|---|
| | | | Siskeudes , Siskeubl ud, Aku hadir, Ape ndukung, eLPPD | | | |
| 2 | 1. | Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 | 100,00 % Ket.: | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik | 100,00 % Ket. : 40/40 x 100% = 100% |
| | 2. | Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | 98,00 % Ket.: 41/42 x 100 % = 98% | | | |
| | 3. | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 33,33 % Ket.: 14/42 x 100 % = 33,33 | | | |
| | 4. | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam | 100,00 % Ket.: 115/115 x | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | dokumen proses bisnis yang telah implementasikan secara elektronik | 100% = 100% | | |
| 5. | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | 41,74 % Ket.: $48/115 \times 100\% = 41,74$ | | |
| 6. | Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 40,00 % Ket.: $46/115 \times 100\% = 40$ | | |
| 7. | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | 100,00 % Ket.: $115/115 \times 100\% = 100\%$ | | |
| 8. | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 100,00 % Ket.: $42/42 \times 100\% = 100\%$ | | |
| 9. | Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | 100,00 % Ket.: $42/42 \times 100\% = 100\%$ | | |
| 10. | Persentase perangkat daerah yang | 100,00 % | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| | memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | Ket.: 42/42 x 100% = 100% | | | |
| | 11. Persentase data yang dapat berbagi pakai | 100,00 % Ket.: 19576/195 76 x 100% = 100% | | | |
| | 12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city | 100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100% | | | |
| | 13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | 100,00 % Ket.: 13/13 x 100 % = 100% | | | |
| | 14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government | 5,00 buah Ket.: | | | |
| 3 | 1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 91,95 % Ket.: 80/87 x 100% = 91,95% | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota ----- x 100% | 94,64 % Ket. : 892803/943 391 x 100% = 94,64% |
| | 2. Persentase konten | 96,88 % | | Jumlah penduduk | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) | Ket.: 31/32 x 100 % = 96,88 % | | | |
| 3. | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | 88,09 % Ket.: 37/42 x 100% = 88.09 | | | |

2. Statistik

| No | IKK Output dan Capaian Kinerja | IKK Outcome | Rumus | Capaian Kinerja | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 1. Tersedianya buku profil daerah | 6,00 buku Ket.: Buku Analisis Indeks Harga Konsumen, Buku Inflansi, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, Buku Indikator | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD | 97,60 % Ket. : 41/42*100% = 97.6% |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, | | |
| 2. | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan | 46,00 Ket.: | | |
| 3. | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | 46,00 Ket.: | | |
| 4. | Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 46,00 Ket.: | | |
| 5. | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 46,00 Ket.: | | |
| 6. | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik | 100,00 % Ket.: 17/17 *100% = 100% | | |
| 7. | Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | 100,00 % Ket.: 17/17 *100% = 100% | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD | 97,60 % Ket. : 41/42*100% =97.6% |
|--|--|--|--|---|

3. Persandian

| No | IKK Output dan Capaian Kinerja | IKK Outcome | Rumus | Capaian Kinerja |
|----|---|---|--|--|
| 1 | 1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | 100,00 % Ket.: 0/0 x 100 % = 100% | Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian | 0,47 % Ket. : 306/645 x 100% = 0.474 |
| | 2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | 0,08 % Ket.: 5/64 x 100 % = 0.078 | | |
| | 3. Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 0,09 % Ket.: 6/64 x 100% = 0.094% | | |
| | 4. Persentase titik yang | 100,00 % | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | Ket.: 42/42 x 100 % = 100% | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

| | URUSAN PEMERINTAHAN | KBJK STRA. | PROGRAM DAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|---|--|------------|---|--|---|---------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 15.340.100,00 Realisasi: Rp. 15.339.300,00 Persentase: (99,99%) | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah teridentifikasi 5 dokumen | 5 dokumen (100.00%) | | |
| | | | | 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.999.000,00 Persentase: (99,99%) | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan | 12 bulan (100.00%) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD teridentifikasi 12 bulan | | | |
| | | | b PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 4.506.143.750,00 Realisasi: Rp. 4.029.505.980,00 Persentase: (89,42%) | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN teridentifikasi 12 bulan | 12 bulan (100.00%)) | | |
| | | | | 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 148.565.000,00 Realisasi: Rp. 147.335.000,00 Persentase: (99,17%) | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN teridentifikasi 1 kegiatan | 1 kegiatan (100.00%)) | | |
| | | | | 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 49.999.900,00 Realisasi: | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triw ulan/Semeste ran SKPD dan laporan | 18 laporan (100.00%)) | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---------------------------|--|
| | | | | Rp. 49.999.100,00 Persentase: (100,00%) | koordinasi penyusunan laporan keuangan Bul anan/Triwulan /Semesteran SKPD 18 laporan | | |
| | | c | PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.890.367,00 Persentase: (99,27%) | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor teridentifikasi 12 bulan | 12 bulan (100.00%) | |
| | | | | 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 81.500.000,00 Realisasi: Rp. 81.405.050,00 Persentase: (99,88%) | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan | 12 bulan (100.00%) | |
| | | | | 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 35.000.000,00 Realisasi: Rp. 34.779.300,00 Persentase: | Tersedianya peralatan Rumah Tangga 12 bulan | 12 bulan (100.00%) | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--------------------|--|
| | | | | (99,37%) | | | |
| | | | | 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 45.331.000,00 Realisasi: Rp. 45.331.000,00 Persentase: (100,00%) | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan | 12 bulan (100.00%) | |
| | | | | 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 23.500.000,00 Realisasi: Rp. 22.920.000,00 Persentase: (97,53%) | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan | 12 bulan (100.00%) | |
| | | | | 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 219.000.000,00 Realisasi: Rp. 217.970.525,00 Persentase: (99,53%) | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan | 12 bulan (100.00%) | |
| | | d | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan | 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: | Belum teridentifikasi 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|--|
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | (100,00%) | | | | |
| | | | | 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.505.000,00 Persentase: (98,02%) | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%) | | |
| | | | e PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 167.325.000,00 Realisasi: Rp. 158.555.500,00 Persentase: (94,76%) | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%) | | |

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

| URUSAN PEM | KBJK | PROGRAM | URAIAN SUB KEGIATAN | TARGET | REALISA | PERMASALAHA | UPAYA |
|------------|------|---------|---------------------|--------|---------|-------------|-------|
|------------|------|---------|---------------------|--------|---------|-------------|-------|

| | ERINTAHAN | STR A. | DAN KEGIATAN | | SI | N | MENGATASI PE RMASALAHAN |
|---|--------------------------------|-----------|--|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | KOMUNIKASI & INFORMATIKA | | a PROGRAM PENGELOL AAN INFORMASI DAN KOMU NIKASI PUBLIK, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota | 1) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Anggaran: Rp. 28.180.000,00 Realisasi: Rp. 28.125.500,00 Persentase: (99,81%) | Terlaksananya pendataan menara telekomunikasi 17 kecamatan 17 kali | 17 kali (100.00%) | |
| | | | | 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Anggaran: Rp. 177.800.000,00 Realisasi: Rp. 177.571.500,00 Persentase: (99,87%) | Terlaksananya pemberdayaan KIM, rebug warga, lomba fkm metra, studi banding 10 Kim, Terlaksananya pemberdayaan KIM, rebug warga, lomba | 10 Kim, 10 Kim (100.00%) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------|--|--|
| | | | | | fk metra, studi banding 10 Kim | | | |
| | | | | 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Anggaran: Rp. 177.800.000,00 Realisasi: Rp. 177.571.500,00 Persentase: (99,87%) | Terlaksananya pemberdayaan KIM, rebug warga, lomba fk metra, studi banding 10 Kim, Terlaksananya pemberdayaan KIM, rebug warga, lomba fk metra, studi banding 10 Kim | 10 Kim, 10 Kim (100.00%) | | |
| | | | | 4) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 275.000.000,00 Realisasi: Rp. 274.678.000,00 Persentase: (99,88%) | Terlaksananya pengadaan peralatan multimedia 8 unit | 8 unit (100.00%) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------------------|--|--|
| | | | | 5) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Anggaran: Rp. 32.724.000,00 Realisasi: Rp. 32.260.020,00 Persentase: (98,58%) | Terlaksananya a Pengelolaan Sapamas dan Media Sosial Pemerintah 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%)) | | |
| | | | | 6) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 195.934.200,00 Realisasi: Rp. 195.115.742,00 Persentase: (99,58%) | jumlah dokumen foto, VCD, Kliping Pers 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%)) | | |
| | | | | 7) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Anggaran: Rp. 47.994.500,00 Realisasi: Rp. 47.825.000,00 Persentase: (99,65%) | terlaksananya video konten 10 video | 10 video (100.00%)) | | |
| | | | | 8) Pengelolaan Media Komunikasi Publik Anggaran: Rp. 486.486.500,00 Realisasi: Rp. 479.772.900,00 Persentase: | Tersedianya penyebaran informasi kepada Masyarakat 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%)) | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-----------------------|--|
| | | | | (98,62%) | | | |
| | | | | 9) Pelayanan Informasi Publik Anggaran: Rp. 37.461.800,00 Realisasi: Rp. 36.435.000,00 Persentase: (97,26%) | Terlaksananya rakor PPID dan tertatanya website opd 70 orang | 70 orang (100.00%) | |
| | | | | 10) Layanan Hubungan Media Anggaran: Rp. 395.562.000,00 Realisasi: Rp. 368.621.500,00 Persentase: (93,19%) | Peningkatan kerja sama dengan media 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%) | |
| | | | | 11) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Anggaran: Rp. 134.500.000,00 Realisasi: Rp. 134.402.000,00 Persentase: (99,93%) | Kerja sama dengan mafindo solo raya, desiminsi informasi publik 2 Keg | 2 Keg (100.00%) | |
| | | b . PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah | | 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 312.000.000,00 Realisasi: Rp. 310.863.225,00 Persentase: (99,64%) | Pembangunan FO, Pemeliharaan FO 12 Bulan | 12 Bulan (100.00%) | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-------------------|--|
| | | | Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | c PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 330.220.000,00 Realisasi: Rp. 324.210.950,00 Persentase: (98,18%) | Penataan ruang server, UPS server, License Zoom, pengembangan jaringan FO, 1 Keg | 1 Keg (100.00%) | |
| | | | | 2) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Anggaran: Rp. 19.497.500,00 Realisasi: Rp. 19.282.500,00 Persentase: (98,90%) | Pelatihan SPBE GCIO 1 Keg | 1 Keg (100.00%) | |
| | | | | 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Keandalan integritas data | 1 tahun (100.00%) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------|--|--|
| | | | | <p>Anggaran: Rp. 1.528.937.160,00 Realisasi: Rp. 1.499.118.255,00 Persentase: (98,05%)</p> | <p>dengan adanya DRC, sewa badwidth dedicated dan non dedicated, pengadaan firewall, operasional vidtron, pembuatan aplikasi desa 1 tahun</p> |) | | |
| | | | | <p>4) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Anggaran: Rp. 154.539.340,00 Realisasi: Rp. 151.837.077,00 Persentase: (98,25%)</p> | <p>Kordinasi dalam daerah / luar daerah dalam penyusunan profil kab Karanganyar, tersedianya perangkat pendukung kegiatan berupa kamera miroles, wireless HDMI Transciever, profil Kab. karanganyar 1 Paket</p> | 1 Paket (100.00%) | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|-----------------------|--|--|
| | | | | 5) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Anggaran: Rp. 129.100.000,00 Realisasi: Rp. 128.933.440,00 Persentase: (99,87%) | Peningkatan kualitas aplikasi layanan masyarakat, penyediaan server HCI 1 tahun | 1 tahun (100.00%) | | |
| | | | | 6) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Anggaran: Rp. 155.291.000,00 Realisasi: Rp. 147.310.080,00 Persentase: (94,86%) | Pengadaan CCTV, pengadaan akses point internet di ruang publik, pengembangan desa cerdas, penyusunan masterplan SPBE 10 titik | 10 titik (100.00%) | | |
| 2 | STATISTIK | | a PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Anggaran: Rp. 125.200.000,00 Realisasi: Rp. 124.193.990,00 Persentase: (99,20%) | tersedianya buku statistik karanganyar dalam angka dan kecamatan dalam angka 2 buku | 2 buku (100.00%) | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|---|--|-----------------------|--|--|
| 3 | PERSANDIAN | | a | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI , Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Anggaran: Rp. 65.175.000,00 Realisasi: Rp. 59.075.704,00 Persentase: (90,64%) | Audit keamanan informasi, pelatihan admin sistem OPD, admin sistem DISKOMINFO 10 kegiatan | 10 kegiatan (100.00%) | | |
|---|------------|--|---|---|---|--|-----------------------|--|--|

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN*Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN***Nihil*

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM*Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

- NIHIL -

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- NIHIL -

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

| No. | Nama Inovasi | Deskripsi |
|-----|--------------|---|
| 1 | Geoportal | Aplikasi Satu Peta Karanganyar |
| 2 | Point | Potensi Investasi |
| 3 | SIDOMAS | Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat |
| 4 | SODAGAR | Sistem Online Perdagangan Karanganyar |
| 5 | SIPDesa | Sistem Informasi Pemerintahan Desa, digunakan untuk membantu pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan |
| 6 | Siporang | Sistem Informasi Perkantoran Online Karanganyar |
| 7 | Semarak | Sistem Online Pasar Rakyat Karanganyar |
| 8 | Layangmas | Layanan Anggota Masyarakat, sistem informasi data spasial Kabupaten Karanganyar. |

B. PENGHARGAAN

| No. | Nama Penghargaan | Instansi Pemberi Penghargaan |
|-----|--|---|
| 1 | Keterbukaan Informasi Publik Award Kategori Kabupaten Informatif | Komisi Informasi Publik |
| 2 | Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya | Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) |
| 3 | Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 4 | Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Badan Pemeriksa Keuangan |
| 5 | Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2022 | Provinsi Jawa Tengah |
| 6 | Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2022 | Provinsi Jawa Tengah |
| 7 | Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2022 | Provinsi Jawa Tengah |
| 8 | Top Pembina BUMD 2022 | TopBusiness BUMD Award |
| 9 | Best Digital Performanca kategori divisi humas pemda di soloraya | solopos |

| No. | Nama Penghargaan | Instansi Pemberi Penghargaan |
|-----|---|---|
| 10 | Gerakan Menuju Smart City | Kementrian Komunikasi dan Informatika |
| 11 | Juara III Lomba Film Pendek, Kelompok Informasi Masyarakat | Diskominfo Propinsi Jawa Tengah |
| 12 | Juara I Lomba pertunjukan Rakyat Media Tradisional se Jawa Tengah | Diskominfo Propinsi Jawa Tengah |
| 13 | Keterbukaan Informasi Publik Award Kategori Kabupaten Informatif | Diskominfo Propinsi Jawa Tengah |
| 14 | Website Pemerintah Kabupaten Kota Terbaik Nasional | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)/ Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) |

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan tugas dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 pada umumnya program kerja telah dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai kegiatan berdasarkan petunjuk dan arahan. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan capaian target anggaran di atas 80% (94,20%).

B. SARAN

Dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi, perkembangan dan perubahannya berjalan sangat cepat, sehingga harus senantiasa diantisipasi dan diikuti secara sungguh-sungguh.

Disadari masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul baik secara internal maupun secara eksternal dan pelayanan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dibidang komunikasi dan informatika. Misalnya mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen yang terpadu dan berkesinambungan, peningkatan kapasitas bandwidth, pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi di Kabupaten Karanganyar.
2. Perlunya Peningkatan SDM yang profesional melalui berbagai bimbingan teknis, *capacity building* dan diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan dibidang Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informatika.

Demikian LPT ini disusun untuk memberikan informasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dicapai Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2022 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Karanganyar, Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Assisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Karanganyar



Drs. SUJARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 199003 1 004